

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, dan Asikin, Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn West Publishing Co.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hughes, Jane and Mc.Donald, Scott, 2002, *International Banking Text and Cases*, The Addison-Wesley series in finance, Boston, MA.
- Maria S.W Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir & Murniati, Rilda, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustofa, Muhammad, 2010, *Kriminologi Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Penerbit Sari Ilmu Pratama, Bekasi.
- Siahaan, N.H.T, 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Penerbit Jala, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sjahputra, Iman, 2006, *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Truman, Peter & Reuter, Edwin, 2004, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Institute for International Economics, Washington DC.
- Widodo Eddyono, Supriyadi & Iskandar Chandra, Yonatan, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*, ICJR, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

*The United Nations of Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Ratifikasi atas *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan OJK No. 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2016 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Keputusan Kepala PPATK nomor 3/9/KEP/PPATK/2009 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Keputusan Kepala PPATK Nomor 3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

### **C. Jurnal, Karya Ilmiah dan Internet**

Andika, Auliah, 2012, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang", *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Anonim, "Pelaksanaan Good Corporate Governance Masih Setengah Hati", diunduh dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3780/pelaksanaan-igood-corporate-governancei-masih-setengah-hati>, diakses 09 Maret 2017.

Anonim, "Mengintip Departemen Khusus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme OJK", diunduh dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a9e90bf2f72/mengintip-departemen-khusus-pencucian-uang-dan-pendanaan-terorisme-ojk>, diakses 13 Januari 2018.

- Asia Pacific Group on Money Laundering, “Typologies – Introduction”, diunduh dari <http://apgml.org/methods-and-trends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dae-9c25-6215103e56da>, diakses pada 10 Oktober 2017.
- Dony, Bartanius, “Kapolri : Globalisasi Membawa Dampak Jumlah Kejahatan”, diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-3382764/kapolri-globalisasi-membawa-dampak-jumlah-kejahatan>, diakses 10 Februari 2017.
- Henok, Adrianus Herman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade Based Money Laundering*) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pencucian Uang di Indonesia”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Husein, Yunus, 2003, PPAK : Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 3.
- Imron, Muhammad Ali, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Perbankan”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Istiqomah, Nurul, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Indonesia agar Tetap Berada di Luar Daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mezak, Hendrik Meray, 2006, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review*, Vol. 5, No. 3.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Siaran Pers : OECD dan OJK Luncurkan Prinsip Good Corporate Governance G20/OECD”, diunduh dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OECD-OJK-Luncurkan-Prinsip-Good-Corporate-Governance-G20-OECD.aspx>, diakses 04 Februari 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Lembaga Pembiayaan 2015”, diunduh dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Documents/Buku%20Statistik%20Lembaga%20Pembiayaan%202015>, diakses 08 Februari 2017.
- Pakpahan, Ryckar G.B, 2012, “Implementasi Prinsip Customer Due Dilligance pada Operasional Bank Umum sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pramudityo, Herzen Suryo, 2008, “Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pratiwi, Christina, 2012, “Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Pembiayaan sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lembaga Keuangan Non Bank”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.

- Pratowo, Bayu, 2011, “Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pujianti, Dewi Anggraeni, 2011, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Pedoman Pelaporan”, diunduh dari <http://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>, diakses 18 Februari 2017.
- Saskara Counsellors, “Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, diunduh dari <http://www.saskaralaw.co.id/upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia/>, diakses 18 Maret 2017.
- Waluyo, Edi, 2009, Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3.
- Wibowo, Edi. 2010. Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 10, No. 2.
- Yozami, M. Agus “Pemerintah Tegaskan Komitmen Perangi Penyalahgunaan Beneficial Ownership”, diunduh dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59eda1c988957/pemerintah-tegaskan-komitmen-perangi-penyalahgunaan-i-beneficial-ownership-i>, diakses 13 Januari 2018.
- Yunisa, Dita. 2012. Penerapan Pendekatan Follow The Money Dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering di Indonesia oleh BARESKRIM POLRI. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8, No. 2.
- Zuraya, Nidia, “Sektor Jasa Keuangan Bisa Diandalkan Dorong Pertumbuhan Ekonomi”, diunduh dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/02/23/olt8uv383-sektor-jasa-keuangan-bisa-diandalkan-dorong-pertumbuhan-ekonomi>, diakses 01 Maret 2017.